

BIBLIOGRAPHY

Laws and Regulations

Law No. 31 of 1999 of Eradication of Corruption.

Law No, 12 of 2011 of Establishment of Legislation.

MK Decision No. 25/PUU/XIV/2016.

SUMMARY OF THE DECISION OF CASE NUMBER 25/PUU-XIV/2016

About the word "can" and the phrase "or another person or a corporation" in the
Corruption Crime. *Mahkamah Konstitusi*.

PERMA No. 1 of 2020 regarding The Guidelines of Sentencing of Article 2 and 3 of
Anti Corruption Law.

Books

Mahrucz Ali. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. 2011

Alatas, Syeh Husein. *Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial
Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana
Prenadamedia Group: Jakarta. 2009

Aminanto, Kif. *Politik Hukum Pidana 2 (Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak
Pidana Korupsi*. Jember: Jember Katamedia, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Fifth edit. West publishing Company, 1979.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundan-undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Hadisuprpto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP / Jilid 2, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Herdjito. “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta.” *Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung* (2014): 2.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Ismail, Rumadan. *Penapsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-*

- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Penerapan). Journal Mahkamah Agung RI.* Jakarta, 2013.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Pernadamedia, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Baru Lawan*. Jakarta: KPK, 2009.
- Kutawaringin, Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, ,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- . *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Second Edi. Yoyakarta: Liberty, 1996.
- . “Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum FH-UII* 6 (1997):
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1993.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara*

Pidana. Bandung: Alumni, 2005.

Muladi et al. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, . Bandung: Alumni, 2010.

P.Pangabean, Henry. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Suarda,I.G.W, *Hukum Pidana:Materi Penghapus, Peringan ,dan Pemberat Pidana*,
Malang: Bayumedia, 2012.

Sudirman, Antonius. Hati Nurani Hakim Dan Putusannya. Suatu Pendekatan Dari
Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim.
Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Supandriyo. *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian
Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*.
Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.

Syarifuddin, H.M. *Prinsip Keadilan Dalam mengadili Perkara Tindak Pidana
Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*. Jakarta: Kencana, 2021.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.

Journal Articles

Alexsander, Sandy Doyoba, and Yeni Widowaty. "Faktor Penyebab Timbulnya
Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan." *Indonesian Journal of Criminal Law and
Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 74.

Anugerah, Rizki Akbari, Saputro Adery Ardhan, and Nathaniel Marbun, Andreas.
"MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS: Studi Terhadap Praktik

Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia* 1 (2017): 60.

Anwar, Syamsul. “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008): 15

Ariyanti, V. “Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 40 (2019): 162–174. <https://core.ac.uk/download/pdf/270192312.pdf>. Aryaputra, Muhammad Iftar et al. “MENYOROT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT UNSUR “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” DALAM PERKARA KORUPSI” *Indonesia Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*. (2017): 25

Cardidi, Jajang. “Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana.” *E-Journal Graduate UNPAR* 1, no. 2 (2014): 20.

Dreher, Axel, and Thomas Herzfeld. “The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence.” *SSRN Electronic Journal*, no. June (2011).

[/a/pengurangan-hukuman-syaukani-sesuai-doktrin-hol18189?page=1](#).

Hambali, A R, R Ramadani, and ... “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 36 (2021): 200–223. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/511>.

Hassan, Bassam Abdul Rasool, Zuraidah Binti Mohd Yusoff, Mohamed Azmi

Hassali Othman, Saad Bin, Additional information is available at the end of the Chapter, and <Http://dx.doi.org/10.5772/55358>. “We Are IntechOpen , the World ’ s Leading Publisher of Open Access Books Built by Scientists , for Scientists TOP 1 %.” *Intech* (2012): 13.

<http://dx.doi.org/10.1039/C7RA00172J><https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics><http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2011.12.014>.

Indonesia Corruption Watch. “Catatan ICW Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019 Vonis Tanpa Efek Jera ‘Rata-Rata Vonis Koruptor Hanya 2 Tahun 7 Bulan Penjara” (2020).

Indriana Yayan, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cepalo*, (2018): 121

Khan, Mushtaq H. “A Typology of Corrupt Transactions in Developing Countries.” *IDS Bulletin* 27, no. 2 (1996): 12–21.

Kharisma, Lalu Kukuh, “TINJAUAN TENTANG PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, (2018): 10.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi Dan Implikasi.”* Jakarta: The Jawa Posi Institute Of Pro-Otonomi, 2014.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/48/disparitas-

putusan-identifikasi-dan-implikasi.

Langkun, T. S., Bahrain, M. Wassef, T. Wahyu, and Asram. "Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi" (2014): 42.

McConville, Mike, and Wing Hong Chui. "Legal Research as Qualitative Research." *Research Methods for Law* (2017): 21.

<http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g0b16n.7>.

Monteiro, Josef. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (2007): 131.

<https://media.neliti.com/media/publications/13095-ID-putusan-hakim-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>.

Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, and Caesar Tanihatu. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Abstrak Abstract A . Pendahuluan Tindak Pidana Korupsi Merupakan Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Khusus Yang Se" 3, no. 2 (2021): 77.

Nathalia, Desca Lidya. "Icw Sindir Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2021 Ri Semu." *Antara News*, 2022.

<https://www.antaranews.com/berita/2664137/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis-1-poin-menjadi-38>.

Respationo, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia Jurnal*

Hukum 2, no. 2 (2013): 101–107.

Ria, Ketut, Wahyudani Oktavia, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020” 9, no. 8 (2021): 1434.

Rio Rinaldi Silalahi, “Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Lex Renaissance* 3 (2018).

Sari, V K, and M Rahardjo. “Corruption and Its Effects on the Economy and Public Sectors.” *Journal of Applied Economics in Developing ...* (n.d.): 51.
<https://jurnal.uns.ac.id/jaecd/article/view/42562>.

Sholikin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).” *Rechts Vinding* (2017): 4.

Shoshanna, Sofaer. “Qualitative Methods: What Are They and Why Use Them.” *Health Service Research* 34, no. 5 (1999): 1102.

Sumadi, A. “Independensi Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–648.

Supramurbada Eko, “PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR,” *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* (2021): 43

Ubwarin, Erwin, et al. “Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

Xiv/2016,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* (2017): 51

Wantu, FenceM. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan

Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3
(2012): 479–490.

Online Reference

Antaranews. “Vonis Kasus Korupsi Di 2021,” 2022.

<https://www.antaranews.com/infografik/2618545/vonis-kasus-korupsi-di-2021>.

Accessed March 31, 2022.

Hakim, Amrie. “Pengembalian Uang Hasil Korupsi.” *Hukumonline*. Last modified
2017. <https://www.hukumonline.com/berita>

Khomarul Hidayat, “MA terbitkan PERMA 1/2020, ICW: Hakim yang tidak
mengikuti harus ada sanksi”, Accessed June 25, 2022.

[https://nasional.kontan.co.id/news/ma-terbitkan-PERMA-12020-icw-hakim-
yang-tidak-mengikuti-harus-ada-sanksi](https://nasional.kontan.co.id/news/ma-terbitkan-PERMA-12020-icw-hakim-yang-tidak-mengikuti-harus-ada-sanksi).

Mahkamah Agung Republik Indonesia “MELALUI PERMA NOMOR 1 TAHUN
2020, MAHKAMAH AGUNG INTENS BERUPAYA DALAM MENYUSUN
PEDOMAN PEMIDANAAN” Pn-medankota.go.id, 2021, [http://www.pn-
medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:me-
lalui-perma-nomor-1-tahun-2020-mahkamah-agung-intens-berupaya-dalam-
menyusun-pedoman-pemidanaan&catid=151&Itemid=181](http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:melalui-perma-nomor-1-tahun-2020-mahkamah-agung-intens-berupaya-dalam-menyusun-pedoman-pemidanaan&catid=151&Itemid=181)

Nathalia, Desca Lidya. “Icw Sindir Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2021 Ri
Semu.” *Antara News*, 2022.

[https://www.antaranews.com/berita/2664137/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-](https://www.antaranews.com/berita/2664137/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis-1-poin-menjadi-38)

[2021-naik-tipis-1-poin-menjadi-38](#). Accessed March 31, 2022.

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara.”

Hukumonline. Last modified 2013. Accessed April 7, 2022.

S.H., Tri Jata Ayu Pramesti. “Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan

Negara.” *Hukumonline*. Last modified 2013. Accessed April 7, 2022.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc)

[keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc](#).